



## Keterlibatan perempuan Kristen dalam politik praktis dan gaya kepemimpinan: Sebuah perspektif teologi feminis

Asnath Niwa Natar 

Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

### Correspondence:

[asnathnatar@yahoo.com](mailto:asnathnatar@yahoo.com)

### DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v10i2.1086>

### Article History

Submitted: May 20, 2024

Reviewed: Aug. 08, 2024

Accepted: Aug. 28, 2024

### Keywords:

Christian woman;  
feminist theology;  
leadership model;  
practice politics;  
woman political involvement;  
gaya kepemimpinan;  
keterlibatan perempuan;  
perempuan Kristen;  
politik praktis;  
teologi feminis

Copyright: ©2024, Authors.

License:



**Abstract:** The year 2024 is the year of democracy. In addition to direct presidential elections, legislative elections are held at the Regency, City, Provincial, and Central levels. One aspect that needs attention in consolidating Indonesian democracy is gender equality in political life. After the 2019 elections, gender inequality still exists in Indonesia's political constellation. This can be seen from the unideal number of female parliamentarians. Then, what about the involvement of Christian women in practical politics? Do they get equal political opportunities, and what are the inhibiting factors? What style of women's leadership can contribute to practical politics? This issue will be reviewed from a feminist perspective to provide awareness so that more Christian women are involved in practical politics to fight for the fate of women.

**Abstrak:** Tahun 2024 adalah tahun pesta demokrasi. Selain diselenggarakan pemilihan presiden secara langsung, juga pemilihan legislatif baik tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi, dan Pusat. Kesetaraan gender dalam kehidupan politik adalah salah satu elemen yang harus diperhatikan saat mengkonsolidasikan demokrasi Indonesia. Ketimpangan gender masih terlihat dengan jelas dalam struktur politik Indonesia pasca Pemilu 2019. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa jumlah anggota parlemen perempuan tidak ideal. Bagaimana dengan perempuan Kristen yang terlibat dalam politik praktis? Apakah mereka mendapat peluang yang sama dalam politik, dan apa yang menjadi faktor penghambatnya. Apa gaya kepemimpinan perempuan yang bisa disumbangkan dalam politik praktis? Masalah ini akan ditinjau dari perspektif feminis, dengan tujuan memberikan penyadaran agar lebih banyak kaum perempuan Kristen yang terlibat dalam politik praktis untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan.

## Pendahuluan

Pemilihan umum (PEMILU) tahun 2024 telah berlangsung untuk memilih presiden dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di legislatif baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Banyak orang memfokuskan pada perdebatan tentang calon presiden dan wakil presiden sehingga luput untuk membahas calon-calon anggota legislatif, termasuk keseimbangan gender di dalamnya. Apakah perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencalonkan dirinya dan berperan dalam politik atau tidak. Semua orang, laki-laki dan perempuan, punya hak yang sama untuk terlibat dalam politik demi kemaslahatan rakyat banyak. Namun dari data beberapa kali Pemilu terakhir menunjukkan bahwa masih sedikit jumlah perempuan

yang terlibat dalam politik, dibandingkan dengan laki-laki. Belum lagi kalau dilihat dari segi kualitas, maka akan lebih sedikit lagi. Hal ini dapat dilihat pada data mengenai posisi perempuan di pemerintahan Indonesia pada tahun 2018, hanya ada 14 perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi.<sup>1</sup>

Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional berjumlah 192.828.520, terdiri dari 190.770.329 pemilih dalam negeri dan 2.058.191 pemilih asing pada Pemilu 2019. Jumlah pemilih perempuan lebih besar daripada pemilih laki-laki. Jumlah pemilih perempuan di dalam negeri sebanyak 95.401.580, sedangkan jumlah pemilih perempuan di luar negeri sebanyak 1.155.464.<sup>2</sup> Pada Pemilu ini, terdapat 7.968 orang yang terdaftar sebagai caleg, yang berasal dari 20 partai politik peserta pileg. Dari jumlah tersebut tercatat 4.774 caleg laki-laki dan 3.194 caleg perempuan (lebih tinggi dari Pemilu 2014 sebesar 2.467 orang). Proporsi ini tentunya sudah memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.<sup>3</sup> Namun dari jumlah tersebut hanya mampu mewakilkan 112 atau 19,48% anggota parlemen perempuan dari total 575 kursi di DPR. Sementara di periode sebelumnya berjumlah 97 orang atau 17, 32%. Ini berarti bahwa dari 3.194 caleg perempuan yang berkompetisi di pileg, hanya 3,5 persen saja yang lolos ke senayan.<sup>4</sup> Dengan demikian, kendati jumlah pemilih perempuan lebih banyak, yaitu 96.557.044 orang, namun sedikit yang terpilih, termasuk belum semua pemilih perempuan memilih caleg perempuan.

Tidak hanya itu, walau terjadi peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen namun tidak disertai peningkatan kualitas mereka. Banyak perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR RI karena memiliki hubungan kekerabatan ataupun kekuasaan dengan elit-elit politik (41% dari 118 anggota legislatif), atau sebagai selebriti bermodalkan popularitas semata. Pada periode pemerintahan tahun 2019-2023, terdapat 14 selebriti perempuan di DPR RI.<sup>5</sup> Peningkatan jumlah perempuan di legislatif juga tidak diikuti oleh peningkatan jumlah menteri perempuan di kabinat (eksekutif). Jumlah menteri perempuan hanya 5 orang atau 15%, dari total 34 menteri.<sup>6</sup> Sebagai perbandingan, bisa dilihat jumlah menteri pada periode-periode sebelumnya, yaitu: pada tahun 1998-1999 terdapat 2 orang menteri perempuan, tahun 1999-2001: 2 orang, tahun 2001-2004: 2 orang, tahun 2004-2009: 4 orang, 2009-2014: 5 orang, dan tahun 2014-2019: 8 orang. Ini berarti terjadi penurunan setelah sebelumnya sempat mencapai 8 orang dalam kabinet Jokowi.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Luthfia Ayu Azanella and Inggried Dwi Wedhaswary, "14 Perempuan Yang Terpilih Sebagai Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2018," *Kompas.Com*, last modified 2018, accessed February 3, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/30/12012691/14-perempuan-yang-terpilih-sebagai-kepala-daerah-pada-pilkada-serentak-2018?page=all>.

<sup>2</sup> Siti Nurhayati, "Perempuan Dalam Pemilu 2019, Antara Harapan Dan Kenyataan," *Komisi Pemilihan Umum*, last modified 2019, accessed February 3, 2024, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7829/Sebanyak-575-anggota-DPR-RI-2019-2024-terpilih-resmi-dilantik-dan-diambil-sumpah-pada-1-Oktober-2019-lalu.-Dari-jumlah-itu-sebanyak-463-orang--80-52-persen--adalah-laki-laki-dan-112-orang--19-48-persen--perempuan>.

<sup>3</sup> Nurhayati.

<sup>4</sup> Nurhayati.

<sup>5</sup> Annisa Rahma, "Keterlibatan Perempuan Dalam Pemerintahan, Harus Berdampak Pada Kebijakan," *Jombang*, last modified 2022, accessed February 3, 2024, <https://jombang.nu.or.id/daerah/keterlibatan-perempuan-dalam-pemerintahan-harus-berdampak-pada-kebijakan-VANMJ>.

<sup>6</sup> Rahma.

<sup>7</sup> Andrea Lidwina, "Jumlah Menteri Perempuan Di Kabinet Pasca-Reformasi," *Katadata Media Network*, last modified 2019, accessed February 3, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/23/jumlah-menteri-perempuan-di-kabinet-pemerintahan-pasca-reformasi>.

Dalam pemilu legislatif tahun 2024 jumlah pemilih laki-laki 102.218.503 orang dan pemilih perempuan 102.588.719 orang. Dengan total pemilih laki-laki dan perempuan 204.807.222.<sup>8</sup> Terdapat caleg perempuan sebanyak 37,13% atau 3.669 orang dan 62,3% atau 6.248 orang caleg laki-laki dari jumlah total caleg sebanyak 9.917 orang dari 18 partai politik peserta pemilu nasional.<sup>9</sup> Jumlah pemilih perempuan lebih banyak, namun jumlah caleg perempuan lebih sedikit, kendati jumlah caleg perempuan lebih tinggi dibandingkan Pemilu sebelumnya sebanyak 30%. Disebutkan bahwa jumlah perempuan yang lolos jadi anggota legislatif tidak mencapai 30%, yaitu hanya 114 perempuan atau 19,65 persen total 580 kursi DPR.<sup>10</sup> Tentu saja ini bukan persoalan angka karena jumlah tidak sama dengan kualitas. Namun akan lebih baik bila ada banyak suara perempuan mengingat ada banyak keputusan yang diambil dengan menggunakan system voting dalam parlemen. Dengan dukungan suara yang banyak, maka perempuan akan memperjuangkan nasib sesama perempuan dalam aturan-aturan dan kebijakan yang menyangkut perempuan.

Data di atas menunjukkan masih kuatnya pemahaman dalam diri masyarakat bahwa laki-lakilah yang lebih cocok jadi pemimpin, sedangkan perempuan dianggap tidak mampu atau apolitik. Politik adalah dunia lelaki dan kotor dan penuh dengan kekerasan dan persaingan, dan perempuan tidak cocok berada di dalamnya. Tidak hanya itu, faktor budaya, agama, dan sosial merupakan beberapa hambatan bagi perempuan untuk masuk dalam parlemen.<sup>11</sup> Tentu saja, ini menjadi tantangan bagi kaum perempuan untuk melawan sikap-sikap diskriminatif tersebut.

Jika jumlah keterlibatan perempuan secara umum dalam politik praktis kecil, maka lebih kecil lagi keterlibatan perempuan Kristen, sebagai kelompok minoritas, dalam politik praktis. Untuk itu, saya akan menganalisa faktor penyebab kurangnya keterlibatan perempuan secara umum dan secara khusus perempuan Kristen, dalam politik praktis. Selanjutnya akan menjelaskan pentingnya keterlibatan perempuan Kristen dalam politik praktis sekaligus menawarkan model kepemimpinan perempuan atau feminis. Saya akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan hasil penelitian dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik perempuan dan politik praktis, dan model kepemimpinan perempuan atau feminis. Untuk penulisan, saya menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan masalah yang ada, lalu menganalisisnya dari perspektif teologi feminis.

## **Ketidaksetaraan Gender dalam Politik**

Saat ini kaum perempuan sudah banyak terlibat dalam pengambilan keputusan dan menjadi pemimpin di hampir semua bidang, termasuk lembaga agama, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Secara khusus di Indonesia, kaum perempuan telah dan terus menjabat sebagai pemimpin, mulai dari presiden hingga RW dan RT. Namun jumlah mereka masih kecil dan belum mewakili jumlah perempuan seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa perempuan belum diterima secara penuh dan ada banyak kendala untuk terlibat dalam bidang politik, padahal ada sejumlah isu krusial di negeri ini yang sangat erat kaitannya dengan perempuan. Contoh

---

<sup>8</sup> Komisi Pemilihan Umum, "DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri Dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih," *Komisi Pemilihan Umum*, last modified 2023, accessed February 3, 2024, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>.

<sup>9</sup> CNN Indonesia, "Anggota DPR Perempuan Hasil Pileg 2024 Diprediksi Cuma 19,65 Persen," *CNN Indonesia*, last modified 2024, accessed February 3, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240321133523-617-1077159/anggota-dpr-perempuan-hasil-pileg-2024-diprediksi-cuma-1965-persen>.

<sup>10</sup> CNN Indonesia.

<sup>11</sup> Nurhayati, "Perempuan Dalam Pemilu 2019, Antara Harapan Dan Kenyataan."

isu yang erat dengan perempuan di antaranya adalah lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemberdayaan komunitas, pembangunan desa, kekerasan hingga teknologi informasi di mana perempuan harus terlibat aktif dan partisipatif dalam isu tersebut.

Dari data yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kendati jumlah pemilih perempuan lebih banyak, namun jumlah keterwakilan perempuan di legislatif dan eksekutif sedikit. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa caleg perempuan, nampak bahwa kebanyakan caleg perempuan dipakai hanya untuk menjaring suara perempuan yang merupakan pemilih terbanyak untuk mendukung partai tersebut atau hanya untuk menunjukkan bahwa partai tersebut tidak mendiskriminasi perempuan. Kalau pun ada yang terpilih, maka kebanyakan keberadaan mereka hanya untuk memenuhi kuota 30% yang diberikan kepada perempuan, yang dalam setiap Pemilu tidak memenuhi kuota ini.

Sistem kuota perempuan telah menyebabkan mereka kurang selektif dalam memilih perempuan yang benar-benar berkualitas dan mampu. Karena modal mereka, reputasi, dan popularitas, banyak dari mereka dapat menjadi anggota legislatif. Akibatnya, banyak anggota legislatif perempuan hanya memenuhi kuota dan tidak dapat berpartisipasi secara aktif. Selain itu, perempuan yang bekerja di lembaga legislatif tidak menunjukkan perbedaan—atau, lebih tepatnya, perubahan—dengan pemimpin laki-laki. Banyak perempuan juga melakukan korupsi dan penyuapan, tetapi mereka sendiri tidak menyadarinya.

Selain itu, pemberian kuota kepada perempuan, sebenarnya menunjukkan bahwa perempuan bisa memperoleh posisi ini juga lebih disebabkan karena laki-laki memberikan posisi itu bagi mereka. Dengan kata lain, posisi ini diperoleh karena kebaikan hati laki-laki yang mau sedikit berbagi kekuasaan dengan perempuan. Namun kenyataannya laki-laki belum rela memberikannya kepada perempuan dan diambil kembali dengan cara menyingkirkan caleg perempuan. Kendati memang di antara perempuan yang menerapkan sikap "aji mumpung" (memanfaatkan kesempatan yang ada misalnya sebagai anak atau istri pejabat atau kuota 30%), terdapat juga banyak perempuan yang sebenarnya cukup berkualitas. Ada banyak perempuan yang berhasil dalam upayanya sebagai seorang pemimpin. Dalam hal kemampuan intelektual, perempuan dapat dibandingkan dengan laki-laki; kadang-kadang, perempuan lebih baik. Namun, pemikiran manusia, baik laki-laki maupun perempuan, telah dipengaruhi oleh budaya patriarki. Karena itu, wanita tidak diizinkan untuk memegang posisi kepemimpinan.

Peran dan posisi laki-laki memiliki status yang lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga legislatif dan eksekutif tidak memiliki peran yang signifikan, bahkan di posisi penting. Hal ini juga berdampak pada produk undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat karena orang yang membuat undang-undang adalah laki-laki, sehingga, meskipun tidak umum, kebutuhan perempuan kurang diperhatikan. Artinya, meskipun tidak banyak, ada juga laki-laki yang memperhatikan kepentingan perempuan. Memang, kedudukannya perempuan sebagai pengambil keputusan tidak secara otomatis akan menguntungkan nasib perempuan juga. Hal ini sangat bergantung pada apakah ia peduli dengan nasib perempuan karena tidak semua legislator perempuan yang sadar gender dan mewakili perempuan. Selain itu, ada individu yang masuk ke politik karena dorongan atau kepentingan pribadi. Sementara isu gender atau perempuan tidak disebutkan dalam kampanye, ini tidak menunjukkan bahwa kandidat itu memperhatikan masalah perempuan.

Namun secara umum, kaum perempuanlah yang paling tahu apa yang dialami dan paling dibutuhkan oleh kaum perempuan karena mereka adalah bagian dari kaum ini yang tentunya juga akan ikut merasakan dampak dari berbagai keputusan yang tidak memihak pada perempuan. Keterwakilan perempuan dalam posisi pengambil keputusan, akan memperju-

angka kepentingan-kepentingan perempuan, berdampak bagi kebijakan yang lebih ramah gender dan berperspektif perempuan, serta mengubah cara pandang patriarki.

Karena itu, meskipun kaum laki-laki dapat memiliki pandangan feminis dan bersuara untuk perempuan, adalah lebih baik jika perempuan sendiri yang menyuarakan kebutuhan dan kesejahteraan mereka tanpa diwakili oleh laki-laki. Kaum laki-laki sering kali kurang atau salah memahami dan membahas apa yang diinginkan oleh kaum perempuan. Selain itu, perempuan telah lama dibisukan sehingga tidak dapat didengarkan suaranya. Sekarang adalah waktu bagi perempuan untuk menyuarakan nasib mereka sendiri. Karena perempuanlah yang mengalami situasi terburuk, mereka harus bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Misalnya, perempuan yang mengalami ketidakadilan Laki-laki bisa berempati, tetapi mereka tidak bisa merasakannya seperti perempuan.

## **Faktor Penyebab Kurangnya Keterlibatan Perempuan dalam Politik**

### *Pola Kepemimpinan*

Ada dua standar yang dipraktikkan dalam pola kepemimpinan, yaitu standar laki-laki dan standar perempuan. Standar laki-laki biasanya bersifat top-down dengan ciri-ciri sebagai berikut: bersikap tegas, cepat, efisien, mengacu pada tujuan, dan kurang memperhatikan aspek hubungan antar pribadi. Sedangkan standar perempuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: lemah-lembut dan mempertimbangkan hubungan antar pribadi.<sup>12</sup> Dalam masyarakat, standar laki-lakilah yang dijadikan norma atau patokan apakah seseorang berkompeten atau tidak untuk menjadi pemimpin. Perempuan diharapkan untuk juga memiliki standar maskulin apabila ingin menjadi pemimpin karena sikap perempuan yang lemah lembut dan mempertimbangkan relasi dengan orang lain dianggap tidak tegas, tidak berkompeten (bermutu). Sikap perempuan yang mengandalkan relasi manusia dianggap menunjukkan hakekat perempuan yang bergantung pada orang lain dan kurang mandiri.<sup>13</sup> Jelas sikap seperti ini tidak cocok untuk seorang pemimpin. Akibatnya, banyak kaum perempuan yang mengundurkan diri karena merasa tidak bisa memenuhi standar itu atau sebaliknya bertindak seperti laki-laki demi untuk diakui.<sup>14</sup> Perempuan menggunakan lensa patriarki yang sudah terinternalisasi dalam diri mereka. Jadi walau perempuan sudah bisa memimpin namun perspektif yang digunakan masih didominasi oleh hegemoni maskulinitas.

Sikap kaum laki-laki yang tetap mempertahankan status quo dalam politik dan kepemimpinan juga ikut menyulitkan kaum perempuan untuk duduk dalam jabatan kepemimpinan atau pengambil keputusan. Tidak hanya itu, kecenderungan sekelompok orang, terutama laki-laki, yang tidak mau melepaskan posisi atau kedudukan yang selama ini dinikmati, membuat orang lain tidak mendapatkan kesempatan untuk memimpin, termasuk perempuan. Hal ini nampak ketika seorang perempuan menjadi pemimpin, tidak lama kemudian digoyang dengan isu korupsi. Ada 12 kepala daerah perempuan yang pernah terjerat korupsi, se-

---

<sup>12</sup> Carol Gilligan, *Dalam Suara Yang Lain* (Jakarta: Pustaka Tangga, 1997).

<sup>13</sup> Gilligan. Kohlberg tidak melihat perempuan dari perspektif mereka, tetapi menggunakan perspektif laki-laki untuk mengukur perempuan. Teorinya adalah bahwa standar laki-laki tentang kedewasaan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan secara tegas tanpa terpengaruh oleh orang lain, menyatakan bahwa ketika perempuan menunjukkan sikap yang berbeda dari standar laki-laki, yaitu bergantung pada relasi pribadi, mereka akan dianggap menyimpang dan tidak sempurna.

<sup>14</sup> Asnath Niwa Natar, "Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen," *Jurnal Musawa* 18, no. 2 (2019): 133-147.

perti Ade Yasin, Bupati Bogor; Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo; dan Andi Merya Nur, Bupati Kolaka Timur.<sup>15</sup> Mereka akhirnya menanggalkan jabatannya karena kasus ini.

Dengan demikian kendati orang sudah belajar tentang gender dan feminis, namun dalam praktik masih jauh dari yang diharapkan. Ada banyak halangan yang menghambat perempuan untuk menjadi pemimpin atau menduduki posisi pengambil keputusan. Terkadang perempuan mendapat posisi penting hanya untuk mengisi kekosongan atau cadangan ketika tidak ada laki-laki, atau sekedar memenuhi quota yang ada. Itu pun sering tidak memenuhi target. Quota 30% sulit dicapai dalam Pemilu karena penerapannya yang tidak sesuai bahkan terkesan asal dijalankan. Hal ini dapat dilihat pada Pemilu 2024, di mana pada 18 partai politik peserta Pemilu, hampir semuanya tidak memenuhi persyaratan kuota minimum 30% kandidat perempuan. Kalyanamitra mencatat sejumlah indikator diskriminasi dan tindak kekerasan berbasis gender di sepanjang proses serta tahapan Pemilu 2024 ini.

### ***Budaya***

Minimnya perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan karena cara berpikir yang melihat perpolitikan identik dengan wilayah laki-laki. Dalam kebanyakan budaya di Indonesia, pemimpin berada di tangan laki-laki. Mereka yang memutuskan semua aturan dalam komunitas budaya. Jangankan menjadi pemimpin, terlibat dalam pembicaraan yang berkaitan dengan adat budaya, jarang atau tidak diperkenankan bagi kaum perempuan. Mereka jarang ditanyakan pendapatnya dan hanya menjadi pendengar. Tugas mereka adalah menyiapkan konsumsi bagi para laki-laki yang sedang menjalankan adat.

Adanya anggapan dan penilaian yang tidak obyektif bahwa perempuan tidak mampu menjadi pemimpin tentu tidak dapat dibenarkan dan harus dipertanyakan. Dalam beberapa kasus mungkin benar, namun tidak bisa digeneralisir untuk semua perempuan. Sebab, tidak sedikit perempuan yang berhasil dalam upayanya sebagai seorang pemimpin. Namun karena laki-laki mempertahankan status quo dan lebih menonjolkan kepentingan mereka, maka perempuan tidak diijinkan untuk terlibat dalam kepemimpinan. Malahan, kaum laki-laki cenderung tidak mau melepaskan posisi atau kedudukannya terhadap perempuan dan sesama laki-laki.

### ***Pendidikan***

Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah yang dimiliki kaum perempuan memperkuat kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik praktis atau dalam posisi pimpinan. Meskipun hak untuk pendidikan diberikan kepada semua warga negara, banyak kaum perempuan yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah karena tidak cukup uang atau karena tuntutan untuk segera menikah atau menikah. Jika orangtua kurang mampu maka yang diprioritaskan untuk sekolah adalah anak laki-laki sebagai calon kepala keluarga, sedangkan bagi anak perempuan, diharapkan bisa dinafkahi oleh suaminya nanti. Ini berdampak pada tidak atau kurangnya bekal pengetahuan dan ketrampilan perempuan untuk terlibat dalam politik, apalagi menjadi pemimpin. Tidak heran apabila banyak perempuan yang kurang berminat untuk menduduki posisi dalam politik dan pemerintahan, walau ada peluang atau kesempatan. Mereka cukup puas bekerja sebagai buruh pabrik, pembantu rumah tangga, perawat,

---

<sup>15</sup> Sri Juliati, "SOSOK 12 Kepala Daerah Perempuan Yang Terjerat Kasus Korupsi, Terbaru Ade Yasin," *Tribun News*, last modified 2022, accessed February 3, 2024, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/28/sosok-12-kepala-daerah-perempuan-yang-terjerat-kasus-korupsi-terbaru-ade-yasin?page=3>.

guru, dan karyawan di salon dan restoran, sebagian besar sebagai pekerja bawahan daripada pemimpin.<sup>16</sup>

### ***Kendala Internal Partai Politik***

Sudah umum diketahui bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, butuh banyak pengorbanan, seperti uang, koneksi (orang dalam) dan persyaratan tidak tertulis yang lain. Belum lagi menghadapi intimidasi, kecurangan, dan manipulasi yang terjadi di semua tahap atau wilayah, dari masyarakat hingga di tingkat atas. Dalam sebuah webinar tentang perempuan dalam pemilu yang diselenggarakan oleh Gaia pada tanggal 16 Maret 2024 yang dihadiri oleh caleg perempuan (baik yang berhasil maupun yang gagal), menyampaikan bahwa terjadi kecurangan dalam pemilu seperti: perhitungan suara yang tidak bisa dikontrol. Nomor bawah yang diambil suaranya dalam Sirekap. Misalnya, si caleg mendapat 1000 suara, namun kemudian turun 800 suara, naik lagi menjadi 4.000 suara, lalu turun lagi menjadi 2.500 suara.<sup>17</sup>

Selain itu, terjadi mobilisasi massa dengan menggunakan uang, sehingga walau sudah kampanye ke masyarakat bawah dan orang-orang berjanji untuk memilih tapi jika tanpa uang, orang pindah ke yang memberi uang. Satu suara bisa mencapai harga Rp 500.000 – Rp 1.000.000. Banyak caleg perempuan yang dekat dengan masyarakat namun tidak terpilih. Jadi mustahil seseorang bisa menang tanpa uang. Ini menunjukkan bahwa investasi sosial, akan kalah oleh yang memberi uang.<sup>18</sup>

Ada juga seruan untuk tidak memilih perempuan yang tidak memakai jilbab, mengatakan haram memilih caleg perempuan, janda, dan lain-lain. Terdapat pula ujaran negatif seperti: perempuan tidak bisa menyampaikan visi misi di publik dan tidak diberi ruang untuk menyampaikan visi dan misi. Perempuan dianggap hanya untuk memenuhi kuota 30%, caleg perempuan dianggap tidak berkualitas, terjadi pelecehan seksual (seperti di Ambon/Maluku), mengalami KDRT karena dianggap kurang perhatian pada keluarga karena sibuk politik atau kampanye.<sup>19</sup> Ini semakin membuat perempuan sulit untuk terlibat dalam politik praktis.

Dalam wawancara dengan beberapa caleg, dikatakan bahwa percakapan, pertemuan, produk keputusan dan kebijakan maupun hubungan antar anggota pada partai-partai politik masih cukup sarat dengan sikap feodal, patriarkal dan maskulin.<sup>20</sup> Persaingan tidak hanya terjadi antar partai tetapi juga internal partai. Caleg laki-laki akan bersaing tidak hanya dengan sesama laki-laki, namun juga berusaha menyingkirkan caleg perempuan. Kondisi ini jelas mematikan langkah kaum perempuan yang ingin berpolitik. Perempuan mau atau tidak mau harus patuh pada aturan partai. Salah satu contoh adalah Caleg RW dari partai N yang mendapatkan suara terbanyak dari wilayah pemilihan NTT dipaksa mundur untuk kemudian digantikan oleh seorang laki-laki, mantan gubernur NTT. RW berada di urutan ke lima namun karena kerja kerasnya menemui masyarakat, dia mampu meraup banyak suara, mengalahkan urutan pertama seorang laki-laki. Namun dengan cara licik ia disingkirkan. RW hanya digunakan untuk mendulang suara partai, dan perempuan harus mengalah untuk laki-laki. Ini keputusan Partai dan RW setuju karena VL dibutuhkan dalam DPR RI untuk mendukung partai sebagai partai oposisi. Dikatakan bahwa partai membutuhkan orang yang bisa bicara

---

<sup>16</sup> Natar, "Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen."

<sup>17</sup> Diskusi dalam webinar tentang "Perempuan dalam Pemilu" yang diselenggarakan oleh Gaia pada tanggal 16 Maret 2024

<sup>18</sup> "Perempuan dalam Pemilu"

<sup>19</sup> "Perempuan dalam Pemilu"

<sup>20</sup> Wawancara dengan NA seorang caleg dalam Pemilu 2019 namun gagal terpilih, pada tanggal 27 November 2020.

keras. Dikatakan pula bahwa istri mantan Gubernur itu akan ikut dalam Pilkada sebagai Gubernur NTT, sedangkan RW akan mengikuti Pilkada sebagai bupati. Dengan demikian akan ada dua perempuan yang memegang posisi di NTT. Tapi tetap saja ini meragukan karena masyarakat sudah kecewa dan bisa dipastikan bahwa mereka tidak mau lagi memilih dia karena suara masyarakat terbuang begitu saja. Pertanyaannya mengapa partai N tidak sejak awal membatalkan pencalonan caleg RW kalau memang mau diorbitkan jadi bupati. Dengan demikian masyarakat tidak merasa dibohongi.

Nampak sekali bahwa perempuan hanya digunakan untuk meraup suara bagi caleg laki-laki. Tenaga perempuan dibutuhkan hanya sebagai cadangan. Pemilu sangat sarat dengan nuansa kepentingan, ketidakadilan dan diskriminasi gender (budaya patriarki). Perempuan disingkirkan tidak hanya pada saat pencalonan namun juga ketika sudah dipilih oleh rakyat. Tindakan ini jelas meremehkan dan mengabaikan kepercayaan rakyat yang sudah memilih. Ini jelas upaya penyingkiran perempuan dari politik. Namun kendati banyak kesulitan dan tantangan, masih ada perempuan yang nekad menjajal peluangnya menjadi caleg dan tetap setia berkecimpung di partai politik.

### ***Diri Perempuan***

Selain faktor dari luar diri perempuan yang mempengaruhi kurangnya peran dan keterlibatan perempuan dalam politik, juga ada faktor dari dalam diri perempuan. Beberapa di antaranya adalah karena tidak memiliki minat dalam politik, perasaan tidak mampu, kurang percaya diri atau rendah diri dan takut menghadapi resiko bila salah mengambil keputusan.<sup>21</sup> Untuk menutupi hal tersebut, seringkali perempuan bersembunyi di balik slogan: Di belakang suami yang sukses, ada istri yang hebat. Mereka merasa turut berperan dalam keberhasilan suaminya walau ia tidak tampil di depan. Ibarat film atau drama, perempuan adalah "sutradara" yang mengendalikan jalannya film dan menentukan suksesnya film tersebut. Kaum perempuan seringkali terbuai oleh ungkapan ini yang mungkin saja ada benarnya, tetapi lupa bahwa dia perlu menampilkan diri dan menyuarakan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya dan kebutuhan sesama perempuan, tanpa bersembunyi di belakang laki-laki atau suami. Apalagi dalam kenyataan, ada banyak perempuan yang sebenarnya tidak pernah terlibat atau dilibatkan dalam urusan pekerjaan suami. Mereka tidak menjadi "sutradara", tetapi hanya sebagai "figuran". Tugas mereka adalah mengurus rumah tangga dan tidak boleh ikut campur dalam urusan suami. Tentu saja ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan pekerjaan dalam rumah tangga. Namun ingin mengatakan bahwa perempuan sebenarnya bisa berkiprah lebih luas, tidak hanya di dalam rumah, tapi juga di luar rumah tangga untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak, secara khusus kaum perempuan.

Perempuan kurang terlibat dalam politik bisa juga karena trauma masa lalu pada tahun 1965, di mana kelompok perempuan GERWANI dibungkam dan dikembalikan ke ranah domestik, padahal sebelumnya perempuan sangat aktif dalam politik. Perempuan lalu disibukkan dengan urusan-urusan domestik. Perempuan juga harus minta ijin kepada suami apabila mau terlibat dalam politik, belumlah dengan adanya stigma negatif terhadap perempuan yang pulang malam, misalnya karena harus ikut rapat atau kegiatan politik di malam hari.

Kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik juga disebabkan oleh persaingan di antara sesama perempuan sendiri. Sebagian perempuan tidak ingin melihat ada perempuan lain yang menonjol dan menduduki posisi tinggi. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk men-

---

<sup>21</sup> Asnath Niwa Natar, "Apa Kata Laki-Laki Tentang Perempuan Dan Gerakan Mereka. Suatu Tanggapan Terhadap Pandangan Pdt. Prof. E. Gerrit Singgih, Ph.D," in *Gerrit Singgih. Sang Guru Dari Labuang Baji*, ed. Victor Hamel (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 196.

jejal atau menjatuhkannya. Makanya tidak heran apabila dalam sebuah pemilihan pimpinan, perempuan lebih memilih laki-laki daripada perempuan. Sebaliknya juga terjadi, bila seorang perempuan maju dan memiliki posisi bagus atau strategis, maka ia tidak ingin berbagi peluang dan kesempatan dengan perempuan lain dan hanya ingin dirinya sendiri yang berhasil. Kurang ada solidaritas di antara perempuan untuk saling mendukung ke arah kemajuan. Malah sebaliknya mereka melihat sesama sebagai saingan atau lawan yang harus dikalahkan. Sikap ini jelas menghambat perkembangan kaum perempuan sendiri.<sup>22</sup>

Sikap perempuan yang seperti ini juga akibat dari pengaruh budaya patriarkhal, yang dilegitimasi oleh ajaran agama, yang telah lama membentuk kaum perempuan untuk memosisikan diri sebagai pihak yang kurang penting, tidak berdaya dan tidak mandiri. Sejak kecil perempuan diajarkan untuk bergantung pada orang lain, dan mempersilakan orang lain mengambil keputusan untuk dirinya, dalam hal ini laki-laki. Akibatnya banyak perempuan yang tidak bisa menjadi pemimpin, apalagi memimpin laki-laki.

### **Keterlibatan Perempuan Kristen dalam Politik Praktis**

Selain alasan yang bersifat umum di atas, terdapat alasan dari kekristenan yang melihat politik sebagai sesuatu yang kotor dan penuh persaingan sehingga orang Kristen enggan untuk bicara tentang politik, apalagi terlibat di dalam politik praktis. Tidak hanya masalah pandangan terhadap politik yang negatif, kesulitan itu juga dipengaruhi oleh posisi orang Kristen sebagai kelompok minoritas di negara Indonesia. Laki-laki Kristen saja sulit mendapatkan posisi dalam politik, apalagi perempuan Kristen, tentu jauh lebih sulit lagi. Perempuan menghadapi tantangan dua hingga tiga kali lebih besar dibandingkan dengan laki-laki Kristen, yaitu tantangan sebagai perempuan dan Kristen. Sulitnya perempuan untuk terlibat dalam politik praktis dapat dilihat dari jumlah mereka yang masih hitungan jari, antara lain: menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA): ibu Yohana Yembesi dan ketua partai PSI yang pernah dijabat oleh Grace Natalie.<sup>23</sup> Lima kepala daerah (bupati dan walikota) di Sulawesi Utara adalah perempuan: Tatong Bara, Vonny Anneke Panambunan, Syerly Adeline Sompotan, Sri Wahyumi Manalip, Christiany Eugenia Paruntu,<sup>24</sup> dan satu Bupati perempuan dari Rote Ndao atas nama Paulina Haning-Bullu.<sup>25</sup> Jumlah ini tentu sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah laki-laki sebagai pemimpin. Kondisi yang sama nampak juga dalam pemilihan anggota caleg yang didominasi oleh kaum laki-laki.

Dalam kekeristenan sendiri masih berkembang pemikiran bahwa politik adalah sesuatu yang kotor. Ini berlaku baik bagi kaum laki-laki, maupun perempuan. Pandangan ini dipengaruhi oleh sikap para Bapa gereja yang memisahkan antara pemerintah atau politik dengan gereja. Marthin Luther mengatakan bahwa pemerintah hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, dan tidak boleh mencampuri ajaran gereja (negara dan agama terpisah). Hal mana berbeda dengan pendapat Swingly yang memandang bahwa negara berkuasa hampir secara total dalam gereja (negara dan agama adalah satu). Ini berbeda dengan pemahaman kaum Anabaptis yang memandang negara dan gereja sama sekali terpisah, karena gereja sudah memiliki aturannya sendiri yaitu hukum Allah. Berbeda

---

<sup>22</sup> Natar.

<sup>23</sup> Natar, "Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen."

<sup>24</sup> Isa Anshar Jusuf, "Cantiknya Lima Kepala Daerah Wanita Di Sulawesi Utara," *Tim Manado Bacirita*, last modified 2019, accessed February 3, 2024, <https://kumparan.com/manadobacirita-admin/cantiknya-lima-kepala-daerah-wanita-di-sulawesi-utara-1548899139276796574>.

<sup>25</sup> Azanella and Wedhaswary, "14 Perempuan Yang Terpilih Sebagai Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2018."

dengan semua itu, Calvin melihat negara dan gereja saling berkaitan, gereja mengurus masalah kerohanian atau kehidupan kekal, dan negara atau pemerintah mengurus tata kehidupan sipil dan lahiriah yang benar. Kekuasaan politis dilihat sebagai panggilan suci dan sah di hadapan Allah, dan bukan sebagai sesuatu yang kotor apalagi dosa, karena tugas utamanya adalah melindungi pelaksanaan ibadah dari sudut lahiriah, menjaga ketentraman umum, membina kesusilaan, dan melindungi harta milik setiap orang atau warga masyarakat, termasuk orang Kristen.<sup>26</sup> Dengan demikian politik dilihat sebagai tugas mulia yang harus dijalankan secara baik demi kebaikan semua orang dan alam ciptaan Tuhan. Tanpa pemerintah dan aturannya, negara dan masyarakat akan kacau. Selain itu pemerintah dan hukum-hukumnya berada di bawah hukum Allah yang harus dijalankan dengan rasa takut akan Tuhan. Begitu pun sebaliknya gereja perlu memberikan ajaran Alkitab kepada pemerintah atau negara namun tidak boleh mengatur negara. Keduanya, gereja dan negara bertanggungjawab kepada Tuhan.<sup>27</sup> Dari sini nampak bahwa Gereja dan negara terpisah namun saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Pelayanan yang dilakukan sebagai petugas negara dan petugas gereja perlu dilakukan dengan penuh komitmen dan tidak boleh dicampuradukkan.

Kendati demikian, masih banyak saat ini orang Kristen, secara khusus kaum perempuan yang belum berani atau takut untuk terlibat dalam politik praktis. Kalau pun ada, jumlahnya sedikit dengan tantangan yang berat karena pandangan-pandangan yang kurang jelas terhadap sikap gereja terhadap politik. Untuk lebih mendukung sikap terhadap keterlibatan perempuan dalam politik praktis, maka di bawah ini saya akan melakukan tinjauan terhadap beberapa tokoh pemimpin dalam Alkitab, yang akan membuka wawasan kita tentang kepemimpinan perempuan sekaligus bisa menjadi contoh bagi kaum perempuan dalam berpolitik.

## **Tinjauan Alkitab tentang Keterlibatan Perempuan dalam Politik dan Model Kepemimpinan Perempuan**

Posisi perempuan dalam Alkitab (perjanjian lama dan perjanjian Baru) berada di bawah laki-laki dan menjadi milik laki-laki (ayah dan suami). Dalam posisi yang demikian perempuan tidak boleh belajar dan mengajar (1Kor 14: 33-40, 1Tim 2: 12-15: Perempuan harus berdiam diri), dan tidak boleh memerintah dalam politik dan agama. Urusan negara dan agama adalah urusan laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk yang apolitik. Kendati demikian, muncul juga perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin, antara lain Miriam, Debora dan Ester, yang justru menunjukkan kekhasan mereka sebagai perempuan.

### ***Kepemimpinan Miryam (Bil. 12:1-16)***

Miryam adalah salah satu pemimpin bangsa Israel bersama dengan saudara laki-laknya Harun dan Musa. Ia juga disebut sebagai Nabiah (Kel. 15:20) dan dalam Mikha 6:4 disebut sebagai seorang pemimpin (penganjur, pelopor) yang setara dengan Musa dan Harun.<sup>28</sup> Namun karena dia dan Harun mengkritik Musa yang menikahi perempuan Kush, ia dihukum dalam bentuk penyakit kulit (kusta). Dari segi feminis, memang tindakannya kurang tepat karena menunjukkan sikap rasis (perbedaan suku) dan mencela sesama perempuan, namun pada saat yang sama, ia juga membela istri Musa, Zipora, yang diduakan oleh Musa. Dan hukuman dari Tuhan tidak berkaitan dengan tindakannya ini. Miryam dihukum bukan atas

---

<sup>26</sup> Mery Kolimon, "Yohanes Calvin: Politik, Jabatan Gerejawi, Dan Relevansinya Bagi Gereja Masa Kini," *Jurnal Ledalero* 15, no. 2 (2016): 265–266, <http://ejournal.iftkledalero.ac.id>.

<sup>27</sup> Kolimon.

<sup>28</sup> Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology, *Membaca Alkitab Dengan Kaca Mata Baru. Tafsir Feminis Kristis Untuk Pembebasan Dan Transformasi* (Yogyakarta: AWRC, 2013).

kesalahannya, melainkan atas kesalahan Musa. Lalu mengapa hanya Miryam yang dihukum, sementara Harun tidak. Apakah karena dia seorang perempuan? Padahal Tuhan sendiri yang melarang bangsa Israel untuk menikah dengan orang dari suku lain demi menjaga kemurnian bangsa Israel dan ibadah kepada Yahweh (Ul. 7:3-6; Krl. 34: 16; Mal.2:11-16).

Tidak hanya itu, Musa juga sudah menduakan istrinya Zipora. Pertanyaan mereka dalam ayat 2 juga benar bahwa kepemimpinan yang mereka jalankan adalah kepemimpinan komunal atau terbagi, bukan hanya satu orang. Mereka juga berhak sebagai imam dan nabiah untuk mengkritik sesuatu yang salah, termasuk pada seorang pemimpin seperti Musa. Jadi kalau dilihat, apa yang dilakukan oleh Harun dan Miryam adalah benar, tetapi mengapa mereka disalahkan terutama Miryam. Namanya bahkan tidak muncul dalam silsilah keturunan Lewi.<sup>29</sup> Apakah Allah sendiri dalam hal ini bias gender dan patriarki? Tindakan diskriminatif ini menjadi salah satu hambatan bagi perempuan dalam menjalankan kepemimpinannya. Kendati demikian tindakan Miryam patut diberi penghargaan karena dia setia pada aturan dan hukum, berani tegas dan menegur pelanggaran-pelanggaran yang ada, termasuk yang dilakukan oleh seorang pemimpin laki-laki. Dia juga menunjukkan model kepemimpinan yang terbagi, setara dan bekerjasama dengan laki-laki, yaitu dengan Harun dan Musa, tapi terutama dengan Harun. Model kepemimpinan Miryam jelas berbeda dengan gaya kepemimpinan laki-laki seperti yang ditunjukkan oleh Musa, yaitu gaya kepemimpinan feodal, mengedepankan kekuasaan, merasa paling benar walau salah, anti kritik, apalagi didukung oleh Tuhan.

#### ***Debora (Hak 4-5)***

Dalam teks Hak. 4 dan 5 digambarkan tentang Hakim Debora yang memimpin bangsa Israel bersama dengan laki-laki. Ada empat laki-laki yang disebutkan dalam teks, di samping raja, pemimpin dan orang-orang kalangan atas, yaitu; Barak, Samgar bin Anat, Heber orang Keni dan Sisera. Debora adalah seorang perempuan yang otonom dan tidak bergantung pada laki-laki atau suaminya, egaliter, berhasil dan bekerjasama dengan Yahweh. Ia memiliki kekuasaan penuh baik secara sosial maupun religius-politis. Kuasa sosialnya terlihat pada pemberian perintah yang sangat menentukan kepada Barak atas nama Yahweh (4:6,7).<sup>30</sup> Dia memiliki beberapa jabatan yaitu sebagai nabiah, penasihat, hakim, komandan militer, ibu, pembebas dan dewi (Hak. 4:5). Debora dan Barak bersama-sama menjadi pemimpin bangsa Israel, namun Debora menduduki posisi yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui penyebutan nama Debora sebanyak empat kali dalam teks, sedangkan Barak hanya disebut sebanyak tiga kali. Nama Barak juga disebut hanya dalam kaitan dengan Debora dan disebut setelah nama Debora.<sup>31</sup>

Gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh Debora adalah gaya kepemimpinan seorang perempuan (ibu) yang bersifat terbagi, berjejaring dan menjadi mitra sejajar dengan laki-laki (Barak) dan sesama perempuan (Yael). Debora (bersama Yael) mendemonstrasikan kuasa solidaritas persaudarian (*sisterhood is powerfull*). Dan ini menjadi kunci keberhasilan dalam perjuangan mereka.<sup>32</sup> Debora maupun Yael, sebagai seorang perempuan, memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan membebaskan bangsanya dari penindasan.

<sup>29</sup> Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology.

<sup>30</sup> Asnath Niwa Natar, "Perempuan Dan Politik. Hermeneutik Alkitab Dari Perspektif Feminis," *Jurnal Waskita* 1, no. 2 (2013): 147.

<sup>31</sup> Natar.

<sup>32</sup> Natar.

Kepemimpinan Debora menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin sekaligus mematahkan gambaran tradisional tentang seorang perempuan yang lemah dan bergantung. Debora menunjukkan bahwa seorang perempuan juga bisa terlibat dalam bidang politik, bahkan berperang dan berjuang bagi bangsanya. Perempuan juga memiliki ketegasan, kewibawaan dan strategi melawan musuh yang tidak kalah dengan laki-laki (tanpa bermaksud meniru laki-laki). Kendati Debora menunjukkan sikap kurang berpihak dengan perempuan dalam hal ini dengan ibu Sisera (pada ayat 28, Ibu Sisera menantikan kepulangan putranya, namun tidak ada), namun sikapnya bisa dimengerti karena konteksnya adalah perang.<sup>33</sup>

### ***Kepemimpinan Ester (Ester 2-7)***

Ester bukan seorang pemimpin namun memiliki kuasa sebagai ratu untuk menolong bangsanya Israel (Est. 4:14). Ia bersama Mordekhai, ayah angkatnya, merencanakan tindakan untuk menyelamatkan bangsa Israel karena tindakan Mordekhai yang tidak memberi hormat dan sujud pada Haman, orang kepercayaan raja Ahasyweros. Namun Ester tidak berani menghadap Raja, karena tidak boleh menghadap raja apabila bukan raja yang memanggil. Menghadap raja tanpa dipanggil akan dihukum mati, sementara dia sudah 30 hari tidak dipanggil (Est 4:11). Namun Ester dengan cerdas menggunakan apa yang menjadi kemampuan dan wilayah kekuasaan perempuan, yaitu makanan. Strategi yang ia gunakan adalah mengundang raja dan Haman untuk acara makan bersama di tempat tinggalnya (wilayah kekuasaan ratu atau perempuan). Ini cara yang tepat untuk menyampaikan sesuatu yang penting dan melakukan dialog. Ia tidak menunjukkan rasa marah dan geram terhadap Haman secara spontan atau dengan kekerasan, namun dengan keramahan. Tindakan ini membuat Haman tidak curiga malah merasa tersanjung karena diundang makan oleh ratu. Setelah jamuan makan pertama dan kedua, Ester menyampaikan maksudnya bahwa ada orang yang akan menghancurkan bangsanya termasuk dirinya. Ini yang membuat Haman kemudian dihukum mati. Keberhasilan Ester tidak terlepas dari dukungan Mordekhai dan Hegai, seorang Sida-sida (Est. 2: 8-18). Mereka mampu bekerjasama untuk menyelamatkan bangsa Israel.

Dari kisah Miryam, Debora dan Ester kita melihat bahwa perempuan bisa terlibat dalam politik dan menjadi pemimpin dengan mengedepankan apa yang menjadi ciri khas perempuan, yaitu menerapkan sikap keibuan, keramahan, menggunakan wilayah perempuan (meja makan, dapur, wilayah domestik) tetapi juga berani bersuara, tegas, dan menerapkan kepemimpinan terbagi serta bekerjasama dengan laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama.

## **Gaya Kepemimpinan Feminis (Perempuan) dalam Politik**

Di tengah budaya patriarki yang menghalangi keterlibatan perempuan dalam politik, nampak bahwa masih ada perempuan-perempuan yang melibatkan diri mereka, baik dalam sejarah Alkitab, maupun dalam masyarakat Indonesia. Bahkan jauh sebelumnya sudah ada beberapa perempuan Kristen yang terlibat dalam politik, yaitu pada angkatan Srikandi atau angkatan pendekar perang, ada nama pahlawan perempuan Maluku: Martha Christina Tiyahahu. Dalam kelompok angkatan yang memperjuangkan emansipasi, ada nama Maria Walanda Maramis dari Sulawesi Utara, dan pada reformasi, ada Clara Sitompul dari partai Krisna.<sup>34</sup>

Perempuan dengan gaya kepemimpinan feminis atau perempuan bisa memberi warna atau mentransformasikan model kepemimpinan yang selama ini terlalu Top-down dengan cara menghidupkan model kepemimpinan terbagi dan tidak berpusat pada satu orang, seperti

---

<sup>33</sup> Natar.

<sup>34</sup> Natar.

yang ditunjukkan oleh Miryam, Debora dan Ester. Miryam menjalankan kepemimpinan bersama Musa dan Harun; Debora bersama Barak dan Yael; dan Ester bersama Mordekhai dan Hegai. Tidak hanya itu, model kepemimpinan perempuan lebih mengedepankan kebutuhan orang lain daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok.<sup>35</sup> Miryam, Debora dan Ester adalah contoh pemimpin perempuan yang berjuang demi kepentingan bangsa Israel, walau untuk itu mereka mendapat hukuman dan terancam nyawanya.

Model kepemimpinan ini menghargai kemampuan setiap orang dan melibatkan sebanyak mungkin anggota dalam menentukan arah dan tujuan lembaga. Anggota dipandang sebagai subyek yang diperhitungkan pendapatnya dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka bukan obyek yang hanya menerima dan menjalankan keputusan yang dibuat oleh pemimpin.<sup>36</sup> Letty. Russell menggambarkan ini sebagai kepemimpinan meja bundar, di mana setiap orang disambut dan terlibat dalam pembicaraan. Semua berada di pusat dan tidak ada yang di pinggiran.<sup>37</sup> Namun, saya kurang setuju dengan gambaran meja bundar ini untuk konteks Indonesia karena mayoritas suku di Indonesia, makan tidak di meja namun tanpa meja yaitu di sekitar dapur. Teologi dapur bisa dikembangkan dan relevan dengan konteks masyarakat di Indonesia. Dapur menjadi tempat berkumpul semua anggota keluarga dan terlibat dalam percakapan yang hangat, tanpa dibatasi atau terhalang oleh meja. Misalnya dalam kehidupan masyarakat Sumba, dapur merupakan wilayah perempuan dan menjadi pusat kegiatan sehari-hari, pengajaran maupun ibadah. Semua anggota keluarga biasanya berkumpul di sekitar dapur untuk beribadah, makan, mendengarkan wejangan dari orangtua, atau sekedar bercerita tentang masalah kehidupan sehari-hari. Di dapur, ibu akan membagikan makanan kepada seluruh anggota keluarga dan sementara itu percakapan juga terjadi. Semua anggota keluarga terlibat dalam ibadah dan percakapan baik laki-laki, perempuan, anak-anak, hamba bahkan orang dari luar keluarga tersebut. Semua duduk sama rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Nampak di sini unsur persekutuan, persahabatan, kekeluargaan, dialog dan keterbukaan pada semua orang tanpa perbedaan.<sup>38</sup>

Ciri kepemimpinan perempuan terdiri dari jaringan hubungan pribadi yang mendorong partisipasi, membagikan informasi dan kekuatan, mendorong orang lain untuk meningkatkan nilai pribadinya, dan memberi kesempatan orang lain untuk merasa bangga atas pekerjaan mereka. Senada dengan itu, John Campbell menggambarkan gaya kepemimpinan perempuan sebagai gaya kepemimpinan yang relasional, terhubung, fleksibel, intim, dan penuh gairah.<sup>39</sup> Sedangkan Indriani Bone<sup>40</sup> menyebut sebagai bentuk lingkaran ketergantungan (*Circles of interdependence*) dimana jatidiri manusia sebagai pribadi diwujudkan dalam suatu jaringan relasi-relasi seperti jejaring laba-laba. Pemberdayaan, sebagai pijakan bagi kepemimpinan perempuan, membuat perempuan dan laki-laki percaya diri dan bekerja berdasarkan otoritasnya sendiri. Barak tidak menerima tawarannya, tetapi Debora menunjukkan model kepemimpinan ini dengan mendo-rongnya untuk berperang. Ia bahkan tidak berani maju tanpa Debora di belakangnya.

Penemuan kepemimpinan secara induktif ini merupakan bentuk kepemimpinan yang diinginkan oleh masyarakat dewasa ini, apalagi negara Indonesia adalah negara republik

<sup>35</sup> Gilligan, *Dalam Suara Yang Lain*.

<sup>36</sup> J. Hendriks, *Jemaat Yang Vital*, Seri Pasto. (Yogyakarta: Pusat Pastoral Yogyakarta, 1995).

<sup>37</sup> Letty M. Russell, *Church in the Round*, (Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press, 1993), 17.

<sup>38</sup> Asnath Niwa Natar, "Arsitektur Gereja Sumba yang Terbuka Terhadap Perempuan", dalam: *Perempuan Kristen Indonesia. Berteologi Feminis dalam Konteks*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 165.

<sup>39</sup> Russell, *Church in the Round*.

<sup>40</sup> Indriani Bone, *Manajemen Gereja Dan Pendeta Sebagai Gembala: Suatu Perspektif Feminis* (Cipayung, 2000).

yang menekankan pada aspek demokratis. Model kepemimpinan feminis ini ada pada perempuan dan laki-laki, namun terutama dipraktikkan oleh perempuan. Ini berarti memberi peluang bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam politik pemerintahan dan menjadi pemimpin.<sup>41</sup>

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh perempuan untuk terlibat dalam politik yaitu membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan. Selain itu, ada Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan yang merupakan jejaring 26 organisasi yang memperhatikan asal-usul kepartaian, agama, dan profesi. Semua jaringan itu memiliki potensi dan posisi penting dalam mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Pengembangan sebuah sinergi usaha sangat penting untuk mendukung perempuan di parlemen. perempuan harus bisa mengorganisir dan berstrategi dengan baik.

Selain itu, perlu ada diskusi bersama untuk saling mendukung di antara sesama perempuan: isu mana yang perlu didahulukan, siapa yang paling berkompetensi, apa yang bisa dilakukan bersama, dan bagaimana peran selanjutnya kalau terpilih. Kaum Perempuan perlu belajar mengkoordinisir dirinya dan leadership untuk bernegosiasi satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Perempuan perlu belajar tentang bagaimana berpolitik yang bersih dan tidak maskulin tapi yang berpihak kepada perempuan. Perempuan perlu mempersiapkan diri jauh-jauh hari dan bukan menunggu saatnya pemilihan, yang terkesan agak dipaksakan. Hal-hal yang perlu dipelajari adalah isu-isu sosial, ideologi partai, dan organisasi.

## Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan, fakta bahwa perempuan terpinggirkan dari peran kepemimpinan dan politik bukan hanya karena mereka tidak bisa melakukannya, tetapi juga karena struktur patriarki dan *kyriarki* yang mendasari gagasan tentang perempuan di Indonesia. Sejarah perempuan dalam Alkitab dan Indonesia telah menunjukkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam politik, bahkan dalam gaya kepemimpinan yang tidak hierarkhi, terbagi, di mana semua orang dapat terlibat dan berpartisipasi. Mereka yang ingin mempertahankan keadaan saat ini memegang kuat struktur kekuasaan patriarki yang telah lama ada dan seharusnya mendorong hal ini. Akibatnya, diperlukan tindakan transformasi untuk mengubah cara berpikir dan menerapkannya dalam kehidupan berpolitik, di mana laki-laki dan perempuan dipandang setara. Tidak mudah untuk keluar dari struktur ini, karena kerja sama antara laki-laki dan perempuan diperlukan.

## Referensi

- Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology. *Membaca Alkitab Dengan Kaca Mata Baru. Tafsir Feminis Kristis Untuk Pembebasan Dan Transformasi*. Yogyakarta: AWRC, 2013.
- Azanella, Luthfia Ayu, and Inggried Dwi Wedhaswary. "14 Perempuan Yang Terpilih Sebagai Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2018." *Kompas.Com*. Last modified 2018. Accessed February 3, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/30/12012691/14-perempuan-yang-terpilih-sebagai-kepala-daerah-pada-pilkada-serentak-2018?page=all>.
- Bone, Indriani. *Manajemen Gereja Dan Pendeta Sebagai Gembala: Suatu Perspektif Feminis*. Cipayung, 2000.
- CNN Indonesia. "Anggota DPR Perempuan Hasil Pileg 2024 Diprediksi Cuma 19,65 Persen." *CNN Indonesia*. Last modified 2024. Accessed February 3, 2024.

---

<sup>41</sup> Natar, "Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen."

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240321133523-617-1077159/anggota-dpr-perempuan-hasil-pileg-2024-diprediksi-cuma-1965-persen>.
- Gilligan, Carol. *Dalam Suara Yang Lain*. Jakarta: Pustaka Tangga, 1997.
- Hendriks, J. *Jemaat Yang Vital*. Seri Pasto. Yogyakarta: Pusat Pastoral Yogyakarta, 1995.
- Juliati, Sri. "SOSOK 12 Kepala Daerah Perempuan Yang Terjerat Kasus Korupsi, Terbaru Ade Yasin." *Tribun News*. Last modified 2022. Accessed February 3, 2024.  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/28/sosok-12-kepala-daerah-perempuan-yang-terjerat-kasus-korupsi-terbaru-ade-yasin?page=3>.
- Jusuf, Isa Anshar. "Cantiknya Lima Kepala Daerah Wanita Di Sulawesi Utara." *Tim Manado Bacirita*. Last modified 2019. Accessed February 3, 2024.  
<https://kumparan.com/manadobacirita-admin/cantiknya-lima-kepala-daerah-wanita-di-sulawesi-utara-1548899139276796574>.
- Kolimon, Mery. "Yohanes Calvin: Politik, Jabatan Gerejawi, Dan Relevansinya Bagi Gereja Masa Kini." *Jurnal Ledalero* 15, no. 2 (2016): 265–266. <http://ejurnal.iftkledalero.ac.id>.
- Komisi Pemilihan Umum. "DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri Dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih." *Komisi Pemilihan Umum*. Last modified 2023. Accessed February 3, 2024.  
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>.
- Lidwina, Andrea. "Jumlah Menteri Perempuan Di Kabinet Pasca-Reformasi." *Katadata Media Network*. Last modified 2019. Accessed February 3, 2024.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/23/jumlah-menteri-perempuan-di-kabinet-pemerintahan-pasca-reformasi>.
- Natar, Asnath Niwa, "Arsitektur Gereja Sumba yang Terbuka Terhadap Perempuan", dalam: *Perempuan Kristen Indonesia. Berteologi Feminis dalam Konteks*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004
- Natar, Asnath Niwa. "Apa Kata Laki-Laki Tentang Perempuan Dan Gerakan Mereka. Suatu Tanggapan Terhadap Pandangan Pdt. Prof. E. Gerrit Singgih, Ph.D." In *Gerrit Singgih. Sang Guru Dari Labuang Baji*, edited by Victor Hamel, 196. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- \_\_\_\_\_. "Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen." *Jurnal Musawa* 18, no. 2 (2019): 139.
- \_\_\_\_\_. "Perempuan Dan Politik. Hermeneutik Alkitab Dari Perspektif Feminis." *Jurnal Waskita* 1, no. 2 (2013): 147.
- Nurhayati, Siti. "Perempuan Dalam Pemilu 2019, Antara Harapan Dan Kenyataan." *Komisi Pemilihan Umum*. Last modified 2019. Accessed February 3, 2024.  
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/7829/Sebanyak-575-anggota-DPR-RI-2019-2024-terpilih-resmi-dilantik-dan-diambil-sumpah-pada-1-Oktober-2019-lalu.-Dari-jumlah-itu-sebanyak-463-orang--80-52-persen--adalah-laki-laki-dan-112-orang--19-48-persen--perempuan>.
- Rahma, Annisa. "Keterlibatan Perempuan Dalam Pemerintahan, Harus Berdampak Pada Kebijakan." *Jombang*. Last modified 2022. Accessed February 3, 2024.  
<https://jombang.nu.or.id/daerah/keterlibatan-perempuan-dalam-pemerintahan-harus-berdampak-pada-kebijakan-VANMJ>.
- Russell, Letty M. *Church in the Round*. Louisville-Kentucky: Westminster John Knox Press, 1993.